

ASPEK HISTORIS PERANAN PBB DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PALESTINA-ISRAEL 1967-1995**NUR ISLAMİYAH**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: nurismocan@gmail.com

Agus Trilaksana

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Palestina-Israel merupakan konflik abadi yang terjadi di Timur Tengah yang menuntut keterlibatan PBB dalam proses perdamaian tersebut. Konflik yang terjadi pada tahun 1967, dan 1973 terjadi perebutan wilayah. Seluruh wilayah Arab Palestina direbut oleh Israel. PBB melakukan berbagai upaya penyelesaian seperti dikeluarkannya resolusi-resolusi, perundingan diantara negara untuk mencari solusi penyelesaian dari konflik ini sehingga konflik ini banyak melibatkan negara-negara besar mengambil peranan dalam konflik ini khususnya peranan Amerika Serikat dalam menentukan keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB.

Dalam penelitian ini rumusan masalah yaitu (1) Apa upaya-upaya yang telah dilakukan PBB dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel 1967-1995, (2) Bagaimana implementasi kebijakan PBB dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel 1967-1995, dan (3) Bagaimana dampak kebijakan PBB, bagi Palestina maupun Israel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah meliputi, heuristic, yaitu pengumpulan sumber yakni sumber primer seperti Koran Kompas, Tempo, suara merdeka, merdeka, dan Surabaya Post. Kemudian sumber sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan internet.

Konflik Palestina-Israel berkembang menjadi konflik regional yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Untuk itu PBB ikut dalam upaya penyelesaian konflik tersebut dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti resolusi-resolusi dan perundingan-perundingan dengan mempertemukan pihak-pihak yang bertikai agar dapat menyelesaikan konfliknya dengan jalan damai. Upaya-upaya yang telah ditempuh oleh DK PBB meliputi dikeluarkannya resolusi DK PBB no 242, resolusi DK PBB no 338, perjanjian Camp David 1978, konferensi internasional tentang masalah Palestina 1981, intifada, konferensi Madrid 1991, hingga perjanjian Oslo 1995. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan PBB dinilai tidak efektif hal tersebut dapat dinilai ketika upaya PBB dalam mengimplementasikan kebijakannya tidak berhasil dijalankan oleh pihak yang bersengketa. Perdamaian dan keamanan jauh dari cita-cita khususnya keikutsertaan Amerika Serikat dalam menggagalkan Veto terkait perdamaian Timur Tengah dan lebih mendukung Israel merdeka tanpa melihat dari segi Palestina. Hambatan lain yakni kurangnya dukungan dari bangsa Arab sendiri dimana terjadi konflik internal yang terjadi antara Hamas dan Fatah yang memiliki perbedaan pandangan sehingga konflik ini sulit diselesaikan.

Kata Kunci: PBB, Konflik Palestina-Israel, Kebijakan**Abstract**

Palestine-Israel is an eternal conflict that occurred in the Middle East requires the involvement of the United Nations in the peace process. The conflict that took place in 1967, and 1973 saw the seizure of territory. The entire Palestinian Arab territories captured by Israel. UN melakukan various remedies such as the issuance of resolutions, negotiated transfers between countries to find solutions to the settlement of this conflict so that this conflict involves many major countries taking part in this conflict, especially the role of the United States in determining the decision that has been set by the UN Security Council.

In this study the formulation of the problem, namely (1) What are the efforts that have been made of the UN in solving the Palestinian-Israeli conflict from 1967 to 1995, (2) how the implementation of the UN policy in the settlement of the Palestinian-Israeli conflict from 1967 to 1995, and (3) What is the impact UN policy, for the Palestinians and Israel. The method used is the method of historical research include, heuristic, namely the collection of resources that primary sources such as newspapers compass, Tempo, noise free, independent, and Surabaya Post. Then the secondary source consists of books, journals, and Internet.

Palestine-Israel conflict growing into a regional conflict that could endanger world peace and security. For the United Nations to participate in the conflict resolution efforts by issuing policies such as resolutions and negotiations to reconcile the warring parties in order to resolving the conflict with the damai.upaya measures that have been taken by

the Security Council include the issuance of a Security Council resolution No. 242 United Nations, UN Security Council resolution No. 338, Camp David agreement of 1978, an international conference on the Palestinian issue in 1981, the intifada, the Madrid conference in 1991, until the agreement oslo 1995. the results showed that the role of the UN is considered ineffective it can be judged when the UN effort in implement its policies are not successfully executed by the parties to the dispute. Peace and security is far from the ideals of participation, especially in the United States related to thwart Middle East peace Veto and more supportive of Israel's independence regardless of the terms of the Palestinians. Another obstacle which is the lack of support from the Arabs themselves where internal conflicts that occur between Hamas and Fattah who have different views so it is difficult to resolve conflicts

Keyword: United Nations, the Palestinian-Israeli conflict, Policy

PENDAHULUAN

Timur Tengah mempunyai posisi yang strategis dalam dunia internasional. Wilayah ini merupakan daerah yang terletak pada pertemuan Eropa, Asia, Afrika sehingga menguasai jalan-jalan vital menuju ketiga benua ini. Kawasan Timur Tengah menjadi ajang rivalitas kekuatan-kekuatan besar sejak pendaratan pasukan ekspedisi Napoleon Mesir tahun 1798. Konflik Palestina-Israel merupakan konflik yang bermula dari usaha Israel untuk menuntut *national homeland* di atas tanah Palestina.¹ Kedua pihak sama-sama ingin memperjuangkan haknya atas tanah tersebut. Sulitnya penyelesaian konflik ini secara mendasar disebabkan tidak terdapatnya titik temu dalam sikap masing-masing pihak yang berkonflik, yaitu Palestina dan Israel. Palestina bersikeras tidak akan merelakan wilayahnya dikuasai oleh Israel, begitupun juga Israel tetap kukuh pada pendiriannya untuk tetap tidak mengubah batas wilayahnya seperti saat ditinggalkan Inggris pada tahun 1948. Konflik ini akhirnya meluas tidak hanya melibatkan Palestina dan Israel saja, tetapi juga turut mempengaruhi kawasan Timur Tengah, bahkan Dunia.

Konflik Palestina-Israel bukan hanya masalah intern bangsa Palestina maupun Israel, akan tetapi konflik mampu menyeret dunia internasional, konflik ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Palestina memiliki satu pandangan yang sama, sementara seluruh bangsa Israel memiliki pandangan yang sebaliknya. Dikalangan bangsa Arab sendiri terjadi perbedaan pandangan dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel, ada yang bersifat radikal dan ada yang bersifat Moderat. Berbagai gesekan juga terjadi di dalam tubuh organisasi pejuang Palestina. Konflik ini akhirnya terus meluas sehingga mempengaruhi kawasan Timur Tengah, bahkan dunia internasional.² Rakyat Arab Palestina sebenarnya merupakan yang paling memiliki kepentingan tapi lebih berposisi sebagai yang pasif walaupun mendapat dukungan dari negara-negara Arab lain seperti Mesir, Suriah dan Yordania. Israel sendiri memang tidak memiliki pendukung di kawasan Timur Tengah, akan tetapi mendapat dukungan dan bantuan dari negara Adidaya Amerika Serikat, Umat Yahudi, *World Zionis Organization*

Palestina berasal dari nama bangsa yang hidup kira-kira pada abad XII SM, bangsa Philistin atau Pulasati. Bangsa Philistin diduga berasal dari laut Aegia, yaitu laut antara Asia Kecil dan Yunani, sehingga bangsa tersebut terkenal dengan sebutan bangsa dari Laut Aegia. Setelah bermukim di darat kemudian menetapkan diri mereka sebagai penguasa daratan sepanjang pantai yang di selatan berbatasan dengan Sinai memanjang sampai pada pesisir Syiria di utara. Dalam penulisan sejarah, nama Palestina disebutkan pertama kali oleh Herodotus, bapak sejarawan bangsa Yunani. Pada zaman kuno Palestina juga dikenal dengan sebutan *Kanaan*. Nama lainnya sebagai tanah yang dijanjikan

Sekitar tahun 3000 SM, bangsa Semmit memasuki wilayah Palestina kemudian disusul bangsa Amorid (2500 SM), Yahudi (1400 SM), Philistin (1200 SM), Persia (538 SM), Yunani (332 SM), Romawi (63 M), Arab (638 M), Turki (1517 M), Inggris (1918 M)³. Hal ini tidak berarti penduduk Palestina berganti-ganti menurut bangsa yang mendudukinya.

Ketika bangsa Yahudi merebut Palestina dari kekuasaan bangsa Philistin mereka terus tinggal menetap. Semenjak itu bangsa Yahudi menganggap Palestina sebagai tanah airnya. Lebih-lebih menurut keyakinan agama mereka menyebutkan bahwa Tuhan, Yehova (Ya Huwa; Arab), menghadiakan tanah Palestina itu kepada Ibrahim, nenek moyang bangsa Yahudi dan Arab. Bangsa-bangsa lain yang menduduki Palestina tidak lebih hanyalah sebagai bangsa penjajah belaka. Berbeda dengan bangsa Arab, di Palestina. Pada tahun 70 M. kemudian tahun 135 M., tentara Romawi merusak dan membakar Jerusalem. Bangsa Yahudi dihancurkan eksistensinya sebagai bangsa (*denasionalized*), kemudian menjadi "*diaspora*" menyebar ke seluruh dunia sebagai orang-orang yang tidak bertanah air (*displaced person*). Sebaliknya bangsa Arab kemudian banyak memasuki tanah Palestina yang kosong, lebih-lebih setelah Islam merebutnya dari kekuasaan Romawi (638 M.), sehingga akhirnya Palestina merupakan tanah Arab belaka. Karena itu bangsa Arab memandang Palestina sebagai tanah air bangsa Arab Palestina.

Terbentuknya Negara Israel tidak terlepas dari dukungan Inggris dan Amerika Serikat. Hal ini dilakukan sebagai upaya balas budi Inggris dan Amerika yang telah mendapat bantuan orang-orang Yahudi dalam Perang Dunia I dan II. Dukungan itu diwujudkan dalam

¹ Kirdi Dipoyudo, *Timur Tengah Dalam Pergolakan* (Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS, 1992), hlm.78.

² Mohammad Shoelhi, *Babak Baru Perundingan Timur Tengah*, dalam <http://kompas.com>, diakses tanggal 1 Maret 2016.

³ Aminuddin kasdi, *Bangsa Arab Palestina & Masa Depannya*, Jurnal (Surabaya Mei 1986), hlm.514.

pernyataan Menlu Inggris Lord Balfour yang terkenal dengan sebutan *Balfour Declaration* sebagai landasan bagi terbentuknya Negara Israel. Disisi lain terbentuknya Negara Israel membawa mimpi buruk bagi bangsa Arab terutama Palestina. Bangsa Palestina menjadi bangsa yang terpecah belah dan banyak penduduknya yang menjadi pengungsi di Yordania, Syiria, Lebanon, dan Mesir. Bangsa Arab sendiri tidak berdaya melawan Israel karena Israel mendapat bantuan dari Negara-negara imperialis, seperti Inggris, Amerika, Rusia dan Perancis. Hal tersebut yang mempersulit bangsa Arab dalam mengalahkan Israel.

Bangsa Yahudi juga membentuk suatu badan perwakilan yang diberi nama *Jewish Agency*⁴ berasal dari kata “*jew*” berarti bangsa Yahudi dan “*Agency*” berarti agen atau perwakilan. *Jewish Agency* adalah badan permusyawaratan bangsa Yahudi pada waktu permulaan bangsa ini berusaha kembali menduduki tanah Palestina. Badan ini merupakan bagian dari Organisasi Zionisme. *Jewish Agency* mempunyai seksi militer untuk melindungi dirinya, Haganah. Sesudah Israel memproklamkan kemerdekaan *Jewish Agency* menjelma menjadi Pemerintah Israel. Israel mendasarkan klaim-klaimnya untuk mendirikan sebuah negara di tanah Palestina atas tiga sumber utama: Pertama, warisan Perjanjian Lama dari kitab Injil, sehingga orang Yahudi meyakini bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Yahudi (*Promise Land*). Hal ini digunakan Theodor Herzl, pendiri Zionis, untuk membangkitkan nasionalisme orang Yahudi melalui *Der Judenstaat* (Negara Yahudi) pada tahun 1896 yang di klaim sebagai kitab orang Yahudi. Herzl melihat “keyahudian” sebagai sebuah nama ras, bukan sebuah agama atau kepercayaan. Herzl dan teman-temannya kemudian mengusulkan agar orang-orang Yahudi menjadi sebuah ras terpisah dari bangsa Eropa, yang mustahil bagi mereka hidup bersama, dan bahwa penting artinya bagi mereka untuk membangun tanah air mereka sendiri. Theodor Herzl sang pendiri Zionisme, suatu saat memikirkan Uganda, dan ini yang kemudian dikenal sebagai Uganda Plan. Theodor kemudian memilih Palestina, dengan beralasan bahwa Palestina dianggap sebagai “tanah air bersejarah bagi orang-orang Yahudi”. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang Yahudi bermigrasi ke Palestina.⁵

Kedua, Deklarasi Balfour yang diumumkan Inggris Raya pada tahun 1917 yang pada intinya penyetujuan rencana pembentukan lokalisasi bagi masyarakat Yahudi di Palestina.⁶ Pengumuman resmi Deklarasi Balfour menandai awal perpindahan Yahudi besar-besaran dan cepat ke Palestina. Ketiga, pembagian Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi yang akan

dorekomendasikan oleh majelis Umum PBB melalui Resolusi PBB No.181 tanggal 29 November 1947. Orang Yahudi masih berharap jika suatu saat mereka bisa kembali pada ‘tanah yang dijanjikan’ mereka berusaha agar tanah tersebut dapat mereka dapatkan. Aliran Zionisme telah dipupuk di berbagai pusat diaspora di sepanjang sejarah, sedangkan menurut sejarahnya, bangsa Yahudi bukanlah penduduk pertama yang menduduki Palestina. Sebelum terjadinya emigrasi massal orang Yahudi dari Eropa, penduduk asli Palestina yang beretnis Yahudi hanya sekitar 8 persen dari keseluruhan populasi dengan kepemilikan tanah di bawah 2 persen. secara keseluruhan populasi pada saat itu lebih banyak dihuni oleh Suku Badui dan orang-orang Arab. Perpindahan orang-orang Yahudi di tanah Palestina sudah dimulai sejak 1920 yang di organisir oleh kaum Zionis yang secara terang-terangan mengubah keadaan demografi Palestina dan telah menjadi penyebab utama terjadinya konflik yang berkepanjangan hingga saat ini. Semakin bertambahnya orang-orang Yahudi di Palestina mengakibatkan penduduk Arab-Palestina semakin terdesak sehingga terjadi konflik Palestina-Israel dan orang-orang Yahudi menggunakan tekanan dan kekuatan mereka untuk mengusir orang-orang Palestina dari tanahnya. Rakyat Palestina melakukan perlawanan atas perlakuan bangsa Israel yang dengan paksa menduduki tanah Palestina. Selama kekuasaan Inggris, lebih dari 1.500 orang Palestina berjuang untuk kemerdekaannya tewas dalam peperangan yang dilakukan oleh tentara Inggris. selain itu terdapat beberapa orang Palestina yang ditahan oleh tentara Inggris karena melakukan perlawanan atas pendudukan Yahudi.

Konflik yang terjadi antara Palestina-Israel dapat kita tarik secara garis besar bahwa perang-perang besar antara kedua bangsa ini terjadi ketika perang tahun 1967 yang dipicu oleh peningkatan intensitas serangan terhadap Israel yang ditanggapi dengan kekerasan bersenjata terhadap negara-negara tetangga Arab, Perang Yom Kippur tahun 1973 yang dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari perang tahun 1967, intifada yang dianggap sebagai bentuk pemberontakan dan pembangkangan sipil yang dilakukan pemuda Palestina karena merasakan adanya ketidakadilan.

Permasalahan antara Palestina-Israel ini dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia karena konflik ini terus berkembang menjadi konflik regional. Oleh karena itu PBB muncul dan ikut terlibat dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.

PBB yang merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan dunia yang salah satu tujuannya memelihara keamanan dan perdamaian dunia. Konflik antara Palestina-Israel menuntut keterlibatan PBB dalam proses perdamaian kedua negara tersebut. PBB telah melakukan upaya-upaya dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel, namun dalam kenyataannya Organisasi ini semacam tidak memiliki daya ikat terhadap Israel karena hingga saat ini konflik antara Palestina-Israel ini masih saja berlangsung dan belum juga mencapai titik temu. PBB telah mengeluarkan resolusi-resolusi yang mengharuskan Israel keluar dari daerah pendudukan namun Israel tetap

⁴ Aminuddin kasdi, *Jewish Agency Versus Bangsa Arab*, Jurnal (Nganjuk, April 1972), hlm.509

⁵ Harun Yahya, *Zionisme: Sebuah Nasionalisme Sekuler yang Mengkhianati Yudaisme*. Diambil dari <http://www.tragedipalestina.com>, diakses tanggal 3 Maret 2016

⁶ Pengumuman resmi Deklarasi Balfour menandai awal perpindahan Yahudi besar-besaran dan cepat ke Palestina

saja tidak mau meninggalkan daerah pendudukan tersebut dan PBB tidak memberikan sanksi yang tegas untuk Israel tidak hanya resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan PBB, berbagai perundingan internasional juga telah di tempuh oleh PBB untuk mencari solusi bersama mengatasi konflik abadi tersebut.

METODE

Untuk mengungkapkan dan mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti, peneliti menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah suatu proses yang digunakan untuk menguji dan menganalisis secara kritis rekaman atau peninggalan masa lampau.⁷ Metode penulisan sejarah berpedoman pada metodologi penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

1. Tahap pertama yang dilakukan dalam metode penelitian ini yaitu penelitian sumber (Heuristik). Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan sebanyak-banyaknya, baik sumber primer maupun sumber sekunder yang terkait dengan Aspek Historis Peranan PBB dalam penyelesaian konflik 1967-1995 penelusuran sumber telah dilakukan sejak semester 6 adapun sumber-sumber yang telah ditemukan yang berupa sumber sekunder antara lain : diperoleh dari majalah, seperti, Arafat, Setelah Saddam Kalah”, Tempo, No.2, th. XXI, Maret 1991, Di Moskow Perang darat di Tentukan”, Tempo, No.52, th. XX, February 1991, Di Moskow Perang darat di Tentukan”, Tempo, No.52, th. XX, February 1991, kemudian Surat kabar, MU PBB Menyatakan Perjanjian Camp David Tidak Sah”, Surabaya Pos, 1 Desember 1979, Koran, “Donald Mc Henry, Calon Utama Pengganti Andrew Young”, Kompas. 18 Agustus 1979, “Penyelesaian Damai Timur tengah tidak mudah. Inilah salah satu kuncinya: PLO (Organisasi Pembebasan Palestina)” Suara Merdeka, Sabtu, 26 September 1981. “Awal Perdamaian Putera-Putera Ibrahim?” Merdeka, Selasa, 31 Juli 1979. “PLO dan Perdamaian Timur Tengah oleh Manai Sophiaan” Minggu Merdeka, 26 Agustus 1979. “Problem Palestina Yang Belum Juga Terpecahkan” Merdeka, 16 September 1979. “Perjanjian Rahasia Amerika – Israel” Oleh Hs. Shafiuddin, Merdeka, Rabu 5 Desember 1979. “Suasana Timur Tengah Tetap Krisis” Oleh: Hs. Shafiuddin, Merdeka, Selasa, 10 Juli 1979. “Perjuangan Rakyat Palestina Dalam Forum Sidang Khusus PBB” Oleh: Dr. H Roeslan Abdulgani. Merdeka, Jum’at, 1 Agustus 1980. “Sumber Konflik Timur Tengah yang tidak kunjung selesai: Status wilayah Palestina dan Kota Yerusalem” Surabaya Post, Rabu, 16 September 1981. Dan makalah seperti , Kedutaan Besar Palestina, “Masalah Palestina dan Konflik Arab-Israel” Untuk pendukungnya, peneliti melakukan penelaan

berbagai buku yang berhubungan dengan Peranan PBB dalam penyelesaian konflik Timur Tengah studi kasus konflik Palestina-Israel 1967-1995, seperti buku yang berjudul Politik antar Bangsa, Hubungan Internasional dan Peranan bangsa Indonesia suatu pendekatan sejarah, Safeguarding the Republic: essays and documents in American foreign relations, Rahasia Dendam Israel Jejak Bberdarah Israel di Palestina dan Dunia Arab, Sejarah Timur Tengah, sejarah Asia Barat dari revolusi Libya sampai Revolusi melati 2012 jilid II, Timur Tengah Pusaran Strategis Dunia.

2. Tahap kedua adalah kritik. Kritik merupakan tahap pengujian terhadapn sumber-sumber yang telah ditemukan, bertujuan untuk menyeleksi data menjadi fakta, pada tahapan kritik ini terdapat dua kritik, yakni kritik intern dan kritik ekstern. Kritik yang dilakukan pertama adalah kritik ekstern, karena pada tahap ini peneliti melakukan pengujian terhadap asli, otektik, turunan, atau palsu atau tidaknya sumber tersebut. Tahap kedua adalah kritik intern peneliti melakukan pengujian terhadap isi kandungan yang terdapat dari sumber itu sendiri.
3. Tahap ketiga yaitu interpretasi data atau penafsiran. Penulisan mencari hubungan keterkaitan antara fakta yang ada pada pokok permasalahan yang ditulis untuk kemudian ditafsirkan. Penafsiran ini dilakukan setelah penulis membaca sumber-sumber dan menganalisis data dan fakta yang telah terkumpul. Kemudian penulis melakukan analisis dari penafsirannya berdasarkan pokok pembahasan.
4. Tahap keempat yaitu Historiografi merupakan penyajian hasil laporan penelitian yang dilakukan dalam bentuk tulisan. Dalam penyusunan Historiografi ini selalu menghubungkan aspek kronologis dengan menghubungkan peristiwa yang satu dengan yang lain, sehingga menjadi rangkaian fakta sejarah yang utuh, tahap ini merupakan akhir dalam tehnik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomer 242 tahun 1967

Dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB Nomer 242 tahun 1967 ini dilatarbelakangi oleh perang enam hari pada tahun 1967 dimana Israel menyatakan perang sebagai respon terhadap ancaman dari Presiden Mesir yakni Nasser. Pada akhirnya hanya dalam waktu enam hari Israel berhasil merebut Tepi Barat dari Yordania, Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai dari Mesir, dan Dataran Tinggi Golan dari Suriah. Meskipun Sinai kembali ke tangan Mesir, tetapi pada saat itu Israel masih menduduki Tepi Barat, Jalur Gaza dan Dataran Tinggi Golan. Israel menguasai semua wilayah Palestina yang memiliki aspek historis itu, dan mendirikan pemerintahan militer baru. Resolusi itu juga menegaskan pentingnya kedaulatan integritas teritorial dan kemerdekaan politik setiap negara bagian di wilayah tersebut. Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 (S / RES / 242) diadopsi dengan suara bulat oleh Dewan Keamanan

⁷ Aminuddin, Kasdi, *Memahami Sejarah*. (Unesa University Press, 2005). Hlm.7

PBB pada 22 November 1967. Hal ini diadopsi di bawah Bab VI dari Piagam PBB. Resolusi ini disponsori oleh duta besar Inggris Lord Caradon dan merupakan salah satu dari lima draft dibawah pertimbangan.

Pada pembukaan mengacu pada "tidak dapat diterimanya akuisisi wilayah perang dan kebutuhan untuk bekerja untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah di mana setiap negara di wilayah tersebut bisa hidup dalam keamanan". Ayat satu menegaskan bahwa pemenuhan prinsip-prinsip Piagam memerlukan pembentukan perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah yang mencakup penerapan prinsip-prinsip berikut:⁸

- i. Penarikan pasukan bersenjata Israel dari wilayah yang diduduki dalam konflik baru-baru ini;
- ii. Pemutusan semua dan pengakuan kedaulatan, integritas teritorial dan kemerdekaan politik setiap negara di daerah dan hak mereka untuk hidup dalam damai dalam batas-batas yang aman dan
- iii. diakui bebas dari ancaman atau tindakan kekerasan . "

Resolusi 242 adalah salah satu resolusi yang paling banyak menegaskan tentang konflik Arab-Israel dan membentuk dasar untuk negosiasi antara kedua belah pihak Ini yang menyebabkan Perjanjian perdamaian antara Israel dan Mesir (1979) dan Jordan (1994), serta 1993 dan 1995 perjanjian dengan Palestina.

B. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomer 338 tahun 1973

Pada tahun 1973, Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak terhadap Israel menyusul hasil memalukan dari perang enam hari 1967. Serangan ini bertujuan untuk menguasai Semenanjung Sinai dan Dataran Tinggi Golan tapi serangan itu dibalik dengan Israel dan perang berakhir dengan gencatan senjata pada tahun yang sama dengan Dewan Keamanan PBB dan mengeluarkan Resolusi 338. Titik utama dalam resolusi adalah keharusan untuk melaksanakan Resolusi DK PBB 242. Resolusi Dewan Keamanan PBB No 338, diadopsi pada tanggal 22 Oktober 1973, dalam resolusi ini upaya PBB menyerukan gencatan senjata di Yom Kippur sesuai dengan proposal bersama oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Resolusi yang ditetapkan gencatan senjata berlaku dalam waktu 12 jam dari adopsi resolusi. Dibawah Amerika atau Soviet yang dinanungi oleh Dewan PBB, klausa ketiga ini membantu untuk membangun kerangka kerja untuk Konferensi Jenewa (1973) yang diadakan pada bulan Desember 1973. Resolusi itu disahkan pada pertemuan DK PBB 1747 oleh 14 orang. dengan satu anggota, Republik Rakyat Cina, tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara.

Dewan Keamanan mengadopsi resolusi 338 (1973), yang menegaskan kembalinya pada prinsip-prinsip resolusi 242 dan menyerukan perundingan yang bertujuan untuk "Keadilan dan perdamaian abadi di

Timur Tengah". Panggilan gencatan senjata itu kemudian dikukuhkan dalam resolusi 339 (1973) dari 23 Oktober, dan Sekretaris Jenderal diminta untuk mengirimkan Pengamat PBB dengan segera. Namun, karena pertempuran berlanjut di beberapa wilayah Presiden Anwar Sadat el dari Mesir segera meminta Uni Soviet dan Amerika Serikat untuk menyelesaikan dengan mengirim pasukannya dan menegakkan gencatan senjata. Sementara Uni Soviet setuju akan tetapi Amerika Serikat menentang permintaan tersebut. Atas permintaan Mesir, Dewan Keamanan berkumpul kembali pada 24 Oktober dan resolusi yang menyerukan penciptaan pasukan penjaga perdamaian baru, yang menjadi Pasukan Darurat kedua PBB (UNEF II).

C. Perjanjian Camp David 1978

Perjanjian Perdamaian Camp David merupakan perjanjian yang diselenggarakan untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah yang ditandatangani tanggal 17 September 1978 di Gedung Putih Amerika Serikat antara Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin.

Perjanjian damai Camp David adalah perundingan rahasia selama 13 hari yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Jimmy Carter. Perjanjian ini memiliki tiga komponen penting yaitu pengakuan Arab terhadap Israel dalam perdamaian, penarikan pasukan Israel dari wilayah-wilayah pendudukan yang diperoleh selama perang serta negara-negara Arab tidak akan mengancam keamanan Israel dan tidak akan membagi-bagi Yerusalem kepada siapapun. Perjanjian ini dilatarbelakangi oleh perang 30 tahun antara Israel dan Mesir sejak berdirinya negara Israel tahun 1948. Akibat perang berkepanjangan yang dialaminya, Mesir menyadari bahwa masalah dengan Israel tidak dapat diselesaikan dengan pertempuran dan upaya diplomatik pun dimulai. Hal ini dilatarbelakangi juga oleh kerinduan masyarakat Timur Tengah untuk hidup damai sehingga kerja sama antar negara Timur Tengah dapat terwujud untuk mengelola sumber daya alam dan manusia yang mereka miliki bisa maksimal dari pada berperang yang hanya akan menyebabkan kerusakan. Inisiatif Presiden Mesir Anwar Sadat untuk mengunjungi Yerusalem dan disambut dengan baik oleh Parlemen, Pemerintah dan Rakyat Israel yang mungkin juga menginginkan perdamaian. Kunjungan tersebut kemudian dibalas oleh Perdana Menteri Israel, Mulailah Ismailia. Sambutan positif dari kedua negara ini menciptakan peluang perdamaian antara ke dua negara.

D. Perjanjian Oslo

Pasca dikeluarkannya resolusi PBB nomor 181 yang mengatur tentang pembagian wilayah kekuasaan tanah Palestina kepada dua Negara yaitu Israel dan Palestina dimana Israel mendapatkan 56% wilayah dan 44% untuk Palestina maka ketegangan dan konflik yang terjadi antara kedua Negara tersebut semakin memanas. Berbagai upaya dilakukan oleh kedua belah pihak Negara untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Ketika tidak adanya titik temu antara ke dua Negara tersebut maka Amerika sebuah Negara adikuasa itu menjadi mediator

⁸ Howard Jones, *Safeguarding The Republic Essays and Documents in American Foreign Relations 1890-1991*, (United States: Library of Congress Cataloging, 1992), hlm.343

untuk menangani konflik yang sedang berlangsung di tanah 1001 malam itu terdapat perundingan bilateral lain antara kedua Negara Israel dan Palestina saat terjadinya perundingan oslo ini sendiri. Ketika itu terjadi Konfrensi Madrid yang di selenggarakan di Washington DC antara Israel dengan Palestina yang diwakili oleh staf pemerintahan masing-masing Negara. Keberlangsungan perundingan Oslo tidak diketahui oleh pihak lain kecuali aktor-aktor yang mengikuti perundingan Oslo ini sendiri. Indikasi dan kecurigaan memang di rasakan oleh para petinggi lainnya seperti pertanyaan yang di ajukan oleh utusan khusus AS Dennis Ross kepada Hanan Ashrawi mengenai pertemuan rahasia yang terjadi antara Israel dan Palestina, namun karena memang Hanan Ashrai tidak mengetahui tentang masalah itu beliau pun tidak memberikan jawaban apapun. Ketika Hanan Ashrawi memberi laporan kepada Yaser Arafat tentang telah dirumuskannya projek Gaza- Jerico di Tunis, dengan tatapan dan senyum yang berbeda Yaser Arafat memberitahukan berita baik kepada Hanan Ashrawi bahwa Israel akan mundur total dari Gaza dan Jerico dan kita Palestina akan menegakkan kedaulatan disana. Meskipun demikian Yaser Arafat tetap belum memberitahukan kepada Hanan Ashrawi bahwa sebenarnya sedang terjadi sebuah perundingan antara Israel dan Palestina di Oslo-Norwegia.

Perjanjian Oslo ke dua hadir sebagai satu ekstensionisasi dari perjanjian Oslo yang pertama. Seperti perjanjian Oslo I dalam perjanjian Oslo II ini pun Amerika Serikat memiliki andil besar dalam tahap penyelenggaraannya. Kesepakatan oslo sendiri teretus di Taba di tandatangani di Washington DC pada tanggal 28 September 1995. Israel tetap memegang control atas wilayah pemukiman Yahudi dan instalasi militer. Mengenai status kota Hebron dan akan dibahas pada negoisasi tahap berikutnya.⁹ Berbeda dengan perjanjian Oslo I, pada perjanjian Oslo II ini prosesnya lebih mudah karena selain di langsunkan secara terbuka namun dari pihak Palestina dan Israel sendiri pun memberi dukungan hal itu dapat di lihat dari peran aktif media massa yang selalu menyoroti hal ini. Koran harian terkemuka yang terdapat di Palestina Al fajar dan dari Israel AL Quds pun menyatakan bahwa sering membritakan tentang persatuan dari kedua belah pihak Negara dan seminimal mungkin menggunakan kata-kata yang bersifat provokatif seperti revolusi.

Pada perjanjian Oslo II ini terdapat poin utama yang berhasil di capai yaitu tentang pembagian wilayah Tepi Barat kepada tiga zona; A, B dan C.pada zona A yang hanya 3 % dari wilayah Tepi Barat secara penuh di bawah kontrol otoritas Palestina, Area C seluas 70% wilayah Tepi Barat berada dibawah kontrol militer Israel kemudian sisanya, area B (yang berada di sebagian Gaza, di sebut Yellow Area), yaitu wilayah yang di kontrol bersama oleh Israel dan Palestina. Dalam deklarasi tersebut juga di tegaskan bahwasanya Palestina harus menyelenggarakan pemilu yang terbuka, jujur dan adil sebagai langkah awal dari pencapaian hak-hak rakyat

Palestina. Pasca disepakatinya perjanjian Oslo II maka serangkaian realisasi pun dilaksanakan Betlehem kota yang selalu di perebutkan oleh kedua belah pihak Negara ini akhirnya pada tanggal 21 Desember 1995 di kembalikan kepada pemerintah otonom.

A. Implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB no 242

Dikeluarkannya Resolusi 242 oleh Dewan Kemanan PBB pada 22 November 1967, merupakan suatu prestasi diplomatik dalam konflik Arab-Israel. Resolusi itu menekankan "tidak dapat diterimanya perebutan wilayah melalui perang" dan memuat rumusan yang sejak itu mendasari semua inisiatif perdamaian tanah bagi perdamaian. Sebagai ganti ditariknya pasukan dari wilayah Mesir, Yordania, dan Syria yang direbut dalam perang 1967, Israel diberi janji perdamaian oleh negara-negara Arab. Resolusi itu menjadi landasan bagi penyelenggaraan pembicaraan-pembicaraan damai antara Israel dan negara-negara Arab yang dimulai di Madrid, Spanyol, pada 1991. Tujuan dari resolusi 242 seperti yang diungkapkan dalam ayat 3, adalah pencapaian penyelesaian damai dan diterima. Ini berarti perjanjian dinegosiasikan berdasarkan prinsip resolusi daripada satu yang dipaksakan kepada pihak lain. Ini juga merupakan implikasi dari Resolusi 338, menurut Arthur Goldberg, duta besar Amerika yang memimpin delegasi untuk PBB pada tahun 1967. Resolusi itu yang diadopsi setelah perang 1973 menyerukan perundingan antara pihak-pihak untuk memulai segera dan bersamaan dengan gencatan senjata. Implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 tersebut akan diwujudkan dalam rancangan-rancangan PBB antara lain:

B. Implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB No 338

Implementasi dari resolusi Dewan Keamanan PBB No 338 tidak jauh berbeda dengan resolusi 242. Setelah Perang Yom Kippur Oktober 1973, Suriah mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB 338 yang disebut di sisi yang berperang untuk bernegosiasi damai di atas dasar Resolusi Dewan Keamanan PBB 242, sehingga mendukung sebagai dasar untuk perdamaian Resolusi 338 Menghimbau semua pihak yang sedang berperang untuk menghentikan semua kegiatan tembak menembak dan segera mengakhiri semua kegiatan militer tidak melewati batas waktu 12 jam setelah disahkannya keputusan ini di tempat-tempat yang mereka duduki sekarang. Berikut himbuan resolusi 338 yang tidak jauh berbeda dengan resolusi 242

1. Menghimbau pihak-pihak yang terlibat untuk memulai (penghentian tembak-menembak) segera setelah dilaksanakannya resolusi Dewan Keamanan no 242 (1967) tentang gencatan senjata dan semua bagiannya.
2. Memutuskan bahwa segera dan bersamaan dengan gencatan senjata negoisasi-negoisasi akan segera di mulai antara pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan yang tepat untuk menegakkan perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah.

⁹ Lihat "Perdamaian tidak mudah dicapai". Koran Kompas, 24 Oktober 1998

Resolusi perang tahun 1973 dan Dewan Keamanan 338 (1973) Pada bulan Oktober 1973, perang yang terjadi lagi antara Mesir dan Israel di wilayah Terusan Suez dan Sinai dan antara Israel dan Suriah di Dataran Tinggi Golan sebagai pertempuran mencapai tahap paling kritis. Uni Soviet dan Amerika Serikat bersama-sama meminta pertemuan darurat kepada Dewan Keamanan. Sehingga pada tanggal 22 Oktober, Dewan Keamanan mengadopsi resolusi 338 (1973), yang menegaskan kembali pada prinsip-prinsip resolusi 242 dan menyerukan perundingan yang bertujuan untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah. Panggilan gencatan senjata itu kemudian dikukuhkan dalam resolusi 339 (1973) 23 Oktober, dan Sekretaris Jenderal diminta untuk mengirimkan pengamat PBB dengan segera. Namun, karena pertempuran berlanjut di wilayah tersebut, Presiden Anwar el Sadat dari Mesir langsung meminta Uni Soviet dan Amerika Serikat untuk campur tangan dengan pasukan dan menegakkan gencatan senjata. Uni Soviet setuju, sedangkan Amerika Serikat menentang permintaan Dewan PBB dan menempatkan dua Super Powers pada pergesekan tersebut. Tentu saja atas permintaan Mesir, Dewan Keamanan berkumpul kembali pada tanggal 24 Oktober di mana resolusi menyerukan dibentuknya pasukan baru.

Kedua pasukan Inggris Darurat negara (UNEF II) sedang bekerja Setelah Mesir dan Israel setuju untuk melepaskan diri pasukan mereka, UNEF II diawasi pemindahan mereka. Berdasarkan perjanjian terpisah mencapai kesepakatan pada Mei 1974, Israel dan Suriah menandatangani perjanjian pelepasan. Hal ini mengakibatkan pembentukan PBB Pelepasan Force (UNDOF), yang ditugaskan untuk memantau perjanjian antara Israel dan Suriah Memang, Resolusi Dewan Keamanan PBB 338 biasanya disebutkan dalam dokumen resmi bersama Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 sebagai dasar untuk perdamaian antara Israel dan tetangga Arabnya. PLO menolak,¹⁰ selama bertahun-tahun, untuk mendukung Resolusi 242 dan 338 karena tidak membuat secara eksplisit orang Arab Palestina sebagai entitas yang terpisah. Yang pasti, ada referensi umum dalam Resolusi 242 untuk "mencapai hanya penyelesaian masalah pengungsi," yang dapat diartikan sebagai menyinggung pengungsi Arab Palestina (serta para pengungsi Yahudi dari negara-negara Arab). Namun, terlepas dari itu, orang-orang Arab Palestina sebagai faktor yang terpisah dalam konflik tidak secara khusus disebutkan dalam Resolusi 242. Namun, seperti yang sudah disebutkan, Persetujuan Oslo antara Israel dan PLO didasarkan pada Resolusi 242. Dengan demikian, PLO dan Otoritas Palestina, yang didirikan pada bangun dari Oslo Accords September tahun 1993, telah diakui Resolusi 242 sebagai dasar untuk kedamaian.

3. Implementasi Perjanjian Camp David 1978

Implementasi dari Perjanjian Camp David mengenai perdamaian yang terpisah antara Mesir dan Israel tidak ambigu atau sangat jelas. Perjanjian tersebut

dilihat sebagai sinyal bahaya bahwa kebijakan luar negeri AS diarahkan dengan gaya NATO yang sangat kuat atau dengan menaruh kekuatan militer di Timur Tengah. Bahkan Syria dan Uni Soviet berkomentar secara langsung bahwa perjanjian tersebut bisa menimbulkan Perang Dunia III. Negara-negara lain juga menunjukkan ketidak setujuannya. Uni Soviet mengatakan bahwa perjanjian tersebut merupakan bentuk perwujudan politik imperialis Amerika Serikat di Timur Tengah dan merupakan usaha untuk memutuskan persahabatan antara Uni Soviet dan dunia Arab. Syria lebih lanjut mengatakan bahwa perjanjian tersebut bisa meningkatkan ketegangan di dunia Arab dan jika terjadi perang maka hal itu akan mengarah menuju perang dunia III. Sementara dari pemerintahan Arab Saudi sendiri menganggap bahwa perjanjian tersebut mengkhianati umat muslim Palestina, yang berarti mengakui keberadaan Israel di Palestina, karena seharusnya Israel menarik diri dari Palestina seluruhnya. Sementara raja Husein dari Yordania menanggapi perjanjian tersebut dengan merasa terkianati oleh AS yang sepertinya telah menyalahi atau menyakiti hati orang Arab.¹¹

Perjanjian perdamaian Camp David ini hanya menguntungkan Negara Mesir, Israel, dan Amerika Serikat saja tanpa memedulikan nasib rakyat Palestina. Bahkan, perjanjian ini seolah-olah hanyalah pembagian kekuasaan diantara ketiga negara tersebut. Mesir secara jelas mengakui bahwa Israel merupakan sebuah negara. Pengakuan ini berakibat sangat fatal terhadap Palestina yang terus menerus diperkecil tanah airnya. Bahkan Palestina sendiri pun mengutuk adanya perjanjian ini. Bukan hanya itu, perjanjian ini pun menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat muslim dunia terhadap bangsa Arab itu sendiri. Penulis setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yasser Arafat bahwa perjanjian palsu tidak akan pernah berlaku. Pada akhirnya, perjanjian ini bukanlah untuk perdamaian, akan tetapi untuk pembagian kekuasaan, dan tentu saja dengan aktor utama Israel bukanlah Amerika Serikat. Hal yang sangat menggelikan bahwa rakyat Amerika Serikat tetap merasa diri mereka superior sementara mereka dengan sangat jelas dikendalikan oleh Israel. Seperti apa yang dikatakan George W Bush dalam pidatonya pasca kejadian 11 September 2001 bahwa perang yang terjadi saat ini adalah perang salib. Sekarang saatnya ummat Muslim sadar untuk tidak begitu saja menuruti keinginan barat untuk memisahkan urusan agama dan kehidupan. Hal yang harus dipikirkan berkali-kali mengingat sejarah yang panjang yang tak terlepas dari agama dan juga pemikiran bahwa sampai sekarang pun perselisihan-perselisihan seringkali diakibatkan oleh agama yang dipolitisasi. Saatnya kita mulai melihat berbagai sisi kebenaran yang seharusnya kita perhatikan, bukannya malah abaikan.

D. Implementasi Perjanjian Oslo

¹⁰ Manai Sophiaan, "PLO dan Perdamaian Timur Tengah", Minggu Merdeka, 26 Agustus 1979

¹¹ *World Reaction: Camp David Could Lead to World War III*. Executive Intelligence Review, Volume 6, number 13, April 3st 1979. Hlm 26-27

Di dunia ini sejatinya hanya terdapat dua buah negara yang mampu untuk melakukan kendali terhadap suatu Negara yaitu Amerika Serikat dan Israel. Di sini, kedua Negara tersebut bergabung untuk mendikte Palestina sebagai objeknya. Jika kita melihat pada kesepakatan pertama yang disepakati pada perjanjian Oslo I maka Palestina yang di wakili oleh PLO merupakan sarana Israel untuk melindungi diri dari serangan orang-orang Palestina yang mereka sebut dengan “teroris”.

Hanan Anshari pun sempat bersitegang dengan Mahmood Abbas oleh karena kesepakatan Oslo I yang telah di tandatangani. Hanan Anshari memprotes kesepakatan tersebut karena pada kesepakatan tersebut tidak di jelaskan secara rinci tentang masalah Kota Jerusalem dan pemukiman Yahudi yang masih menjadi milik Israel. Dalam kesepakatan Oslo ini pun nampak bahwa rakyat Israel belum sepenuhnya mau berdamai dengan Palestina, hal itu di buktikan dengan tregedi terbunuhnya Yitzhak Rabin.

Pada perjanjian Oslo II semakin ambisi Israel akan wilayah kekuasaan yang dimiliki oleh Palestina. Pembagian wilayah Tepi Barat kepada tiga zona membawa Israel kepada otoritas yang semakin menjadi jadi. Pada zona B yang merupakan wilayah dari kedua Negara tersebut bahkan masih dikuasai sepenuhnya oleh tentara Israel. Dalam pembagian kekuasaan wilayah pun warga Israel menmbangun tembok-tembok besar yang memisahkan pemukiman oaring-orang Palestina dan Yahudi, walaupun pembagian itu melebihi batas aturan dan merugikan warga Palestina. Bisa juga dikatakan bahwa dalam perjanjian Oslo II ini Israel semakin menghambat perjuangan Palestina, karena sejatinya perjuangan bangsa Palestina adalah untuk mengembalikan warganya ke tanah dan rumahnya masing-masing yang telah di rampas oleh orang-orang Israel.

Berbagai perundingan dan kesepakatan telah ditandatangani, dari konferensi Madrid (1991), perjanjian Oslo I (1993), hingga perjanjian Oslo II (1995) semua kesepakatan, perjanjian dan keputusan PBB pada intinya menuntut kedua belah pihak menahan diri dari aksi kekerasan. Dan lebih khusus lagi meminta Israel untuk menarik diri dari wilayah Palestina yang didudukinya. Selain itu juga menuntut Israel menghentikan penyerangan warga sipil dan mengakui eksistensi Palestina. Namun semua kesepakatan dan resolusi itu tetap saja dilanggar oleh Israel. Pelanggaran itu disebabkan oleh beberapa persoalan prinsip kedua belah pihak berkaitan dengan kesepakatan perjanjian.

Pertama, masalah Al-Quds. Keberadaan Al-Quds sebagai kota suci tiga agama besar yakni Islam, Kristen dan Yahudi, menjadikan masalah krusial dan vital dalam proses perdamaian Palestina-Israel. Bagi Palestina, Al-Quds adalah Ibukota Palestina merdeka masa depan, namun bagi Israel Quds tetap sebagai kota utuh, tidak terbagi-bagi dan dimasa depan menjadi ibukota Israel. Hingga kini, wilayah tersebut masih dikuasai militer Israel meski belum jelas statusnya. AS memberikan dukungan cita-cita Israel tersebut dalam bentuk memindahkan kedubesnya ke Quds (Jerusalem).

Kedua, masalah Negara Kesepakatan Oslo (1993) tidak jelas atau menentukan hal yang menyangkut masalah negara Palestina. Sikap Israel adalah tidak melarang deklarasi resmi negara Palestina, sebab tidak bertentangan dengan upaya Israel. Namun diingatkan, deklarasi dari satu pihak saja akan berakibat serius bagi masa depan Palestina dan terancamnya perdamaian. Sebenarnya sikap Israel tersebut tidak menghendaki adanya Negara Palestina merdeka dan independen. Ketiga, masalah penyerahan Tepi Barat. Kesepakatan Oslo menghendaki Israel harus melaksanakan tiga gelombang penarikan tentaranya dari Tepi Barat. Namun sikap keras dari para pemimpin Israel, hingga sekarang belum tercapai pelaksanaannya. Akibatnya, Palestina hingga kini hanya menguasai 40% dari Tepi Barat. Bahkan Israel terus membangun pemukiman di tepi Barat, sebagai pengingkaran kesepakatan. Keempat, masalah Pengungsi, Sejak berdirinya Israel 1948, hingga kini lebih dari 5 juta rakyat Palestina hidup sebagai pengungsi di berbagai negara. Kelima, masalah perbatasan. Kedua perbatasan telah diatur dalam perjanjian Oslo, yakni kawasan jajahan 1948, 78% adalah wilayah Palestina. Keenam, masalah air. Pada tahun 1996 Israel Palestina dan Yordania menandatangani kesepakatan mengenai sumber-sumber air.

E. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan PBB

1. Tidak dipatuhinya Kebijakan-kebijakan PBB oleh pihak yang Terlibat Konflik

Upaya PBB dalam usaha perdamaian konflik Palestina-Israel tertuang dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan seperti Resolusi 242, resolusi 338 yang menyerukan penarikan mundur tentara Israel dari wilayah Palestina kemudian juga dilakukan perundingan internasional terkait perdamaian diantara kedua pihak yang bertikai akan tetapi diantara upaya-upaya PBB tersebut tidak membawakan hasil yang signifikan dikarenakan banyaknya pelanggaran atau tidak dipatuhinya oleh salah satu pihak terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan PBB.

Perbedaan *human needs* yang dibuktikan dengan ditolaknya konsep *land for peace* sebagaimana tertuang dalam resolusi DK PBB No.242 karena menganggap bahwa konsep tersebut sangat merugikan Palestina dimana jalur gaza dan tepi barat menjadi teritori Israel. Dalam konsep *land for peace* Israel menarik dan memberikan damai bagi negara-negara Arab. Namun demikian yang negara-negara Arab tersebut inginkan bukanlah damai dimana Israel memiliki ha katas wilayah tersebut dan tidak menyerang negara-negara Arab secara militer melainkan damai dalam artian non eksistensi negara Isarel di wilayah tersebut, sehingga tidak mengherankan jika negara-negara Arab menolak resolusi tersebut.

2. Faktor Intern

Implementasi kebijakan PBB mengalami hambatan, khususnya dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Masalah ini sulit diselesaikan dan mengalami banyak kendala yang disebabkan oleh karena adanya konflik internal di dalam tubuh Palestina, konflik internal ini terjadi antara Hamas dan Fatah. PLO yang pada awalnya diakui sebagai pemegang kekuasaan di Palestina ditentang oleh Hamas karena memiliki perbedaan pandangan dengan PLO yang kemudian faksi inilah yang kerap berkonflik dengan Israel. Pada perkembangannya Hamas menjadi pemegang kekuasaan di Palestina.

Hamas yang beraliran Radikal bercita-cita atas penghancuran Israel sebagaimana yang tertuang dalam piagam Hamas. Piagam ini juga menyerukan atas penguasaan kembali seluruh wilayah Israel dan Palestina dan ingin mendirikan negara Palestina merdeka serta menghapus negara Israel. Faksi ini juga gencar melakukan teror tanpa memperdulikan usaha usaha negara Arab untuk membantu kemerdekaan Palestina pada saat itu dengan cara penandatanganan perdamaian dengan menyerahkan kembali wilayah yang dikuasainya. Hal ini sulit direalisasikan mengingat aksi Hamas yang dari awal memang bersikeras dalam penghancuran Israel.

3. Faktor Ekstern

Keterlibatan Amerika Serikat sangat berpengaruh dalam banyak hal kebijakan PBB terutama dalam menggagalkan veto atas pemukiman rakyat Palestina. Amerika Serikat sangat menggambarkan bagaimana komitmen AS dalam mempertahankan hubungan dengan Israel dan menempatkannya sebagai “anak emas” yang selalu diberi dukungan dan dilindungi dalam usaha mempertahankan kedaulatannya di tanah Palestina.

AS telah memveto banyak resolusi DK PBB yang membatasi hegemoni Israel keberadaannya di tubuh PBB menjadikannya seolah-olah negara yang memiliki wewenang dalam penentuan semua kebijakan yang dilakukan oleh PBB.

Amerika serikat mestinya bersikap adil terhadap kedua belah pihak dan tidak memihak salah satu pihak, namun dalam faktanya hal itu bertolak belakang Amerika cenderung mendukung Isarel walaupun Israel melakukan kesalahan hal ini yang menjadi salah satu hambatan dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.

A. Peranan PBB

Sejak pertama kali berdiri pada 24 Oktober 1945, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)¹² menjadi tumpuan harapan bagi seluruh masyarakat dunia. Kehadiran PBB diharapkan dapat menjadi aktor yang mampu memayungi kepentingan negara anggotanya (*a reliable International agent*). Meski bukan *world government* (Pemerintah Dunia), PBB diharapkan mampu membawa dunia dari konfrontasi ke arah kooperasi. Hal itulah yang membuat semua negara di dunia turut serta dan secara sukarela menjadi anggota PBB.

Dalam upaya perdamaian konflik Israel-Palestina, PBB menjadi mediator yang berusaha untuk memediasi kepentingan antara Palestina dan Israel. Selain itu, terdapat banyak resolusi yang dikeluarkan oleh PBB yang mempengaruhi konflik antara Israel-Palestina. Mediasi yang dilakukan oleh PBB adalah usaha diplomatik yang ditujukan untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 242 dan 338, PBB telah terlibat dalam setiap upaya negosiasi Israel-Palestina, secara tidak langsung. Keterlibatan PBB tersebut telah dimulai sejak tahun 1947, yaitu pemisahan Palestina menjadi Negara Yahudi dan Negara Arab melalui Resolusi 181. Resolusi tersebut ditolak secara tegas oleh negara-negara Arab yang mendukung Palestina.

Pasca pecahnya perang awal antara Israel-Arab, kemudian pada 15 juli 1948 melalui Resolusi DK PBB 54 terdapat perintah gencatan senjata untuk semua pihak guna mengakhiri perang, tetapi pada akhirnya tidak ada yang melakukannya. Israel sendiri menjadi anggota tetap dalam PBB pada tanggal 11 Mei 1949. Palestina sendiri pada saat itu bukan anggota PBB, menganggap bahwa arah resolusi yang dikeluarkan PBB serta negosiasi yang dilakukan lebih menguntungkan Israel.

PBB juga mengambil peranan dalam *Six Day War 1967*, dimana sebuah proposal mediasi dikeluarkan melalui Resolusi DK PBB 242, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1967. Teks resolusi ini mengacu pada penarikan pasukan militer kedua belah pihak dari wilayah konflik, penghentian semua klaim dan kemerdekaan semua negara yang terlibat. Israel menerima resolusi ini, namun Israel tetap bersikeras bersikap bahwa penarikan pasukan dari Negara yang didudukinya dilakukan melalui negosiasi langsung yang mengesampingkan PBB. Negosiasi langsung ini dibuat Israel demi melindungi kepentingan dan haknya sebagai pihak yang memenangkan *Six Day War*, Israel beranggapan bahwa jika dilakukan negosiasi dalam PBB maka kepentingan dan haknya akan dibatasi serta akan ada faktor eksternal yang akan mempengaruhi proses negosiasi. Pada proses negosiasi langsung inilah Israel menyerukan permintaannya *Land for Peace* kepada *Palestinian Liberation Organization* (PLO).

Dari awal konflik hingga sampai saat ini, PBB sering dikesampingkan dalam usaha perdamaian antara Israel-Palestina. DK PBB yang memiliki tanggung jawab utama untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan

¹² Hans J. Morgenthau, *Politik Antar Bangsa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm.548

internasional sesuai dengan Piagam PBB, belum mampu untuk mengatasi konflik Israel-Palestina. Beberapa Negara bahkan menggunakan pengaruhnya untuk menjauhkan isu ini dari agenda PBB. Upaya perdamaian konflik Israel-Palestina menjadi lebih sering dilakukan oleh Majelis Umum PBB.

B. Hubungan Amerika Serikat dengan Israel

Amerika Serikat sebagai negara adidaya tunggal, mestinya bersikap adil dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Namun faktanya menunjukkan sebaliknya, dan sikap ini menjadi salah satu hambatan dalam penyelesaian konflik. Sikap dan keberpihakannya terhadap Israel tersebut justru melanggengkan konflik itu sendiri. Bagi AS, Isarel adalah satu-satunya sekutu strategis di kawasan Timur Tengah. Sikap tersebut karena para pengambil kebijakan AS didominasi kelompok pertama Israel dan mengadopsi pandangan sayap kanan (*Hawkish*) serta kemampuan lobi politik Israel terutama melalui AIPAC.

Keberhasilan lobi tersebut menurut Corbett disebabkan empat faktor yakni:

1. Orang Yahudi rata-rata memiliki pendapatan dan pendidikan yang sangat tinggi, serta menunjukkan kemampuan yang luar biasa.
2. Orang Yahudi sangat aktif dalam perpolitikan AS di semua negara bagian.
3. Konsentrasi orang Yahudi berada di New York.
4. Yahudi sangat aktif dan gigih mencari akses terhadap kongres dan Gedung Putih.¹³

Sementara itu, menurut Lipson dukungan dan keberpihakan AS terhadap Israel, didasarkan pada:

1. Kekuatan militer Israel yang dapat dikatakan terbesar di kawasan Timur Tengah dan kekuatan tersebut dapat diandalkan sebagai partner regional.
2. Penentangan yang kuat dari Israel terhadap negara-negara Arab radikal, yang dalam waktu panjang menjadi sekutu Soviet atau menggantikannya dan masih menjadi ancaman suplai minyak serta stabilitas politik sejumlah pemerintahan Arab sekutu AS.
3. Kesuksesan Israel sebagai negara demokrasi yang stabil, sehingga menarik AS untuk menjadikannya sebagai mitra di tengah wilayah yang selalu bergejolak.

Kesamaan kepentingan politik, ekonomi dan adanya musuh bersama mendorong kedua negara dapat melakukan kerjasama untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Pengejaran kepentingan adalah sesuatu yang harus ditempatkan sebagai prioritas utama¹⁴ Dalam setiap perundingan sangat terlihat jelas bahwa AS

mendukung Israel, karena selain mewarisi semangat demokrasi liberal-sekuler, juga menjadi buffer state AS untuk menghadapi negara-negara Islam radikal. Banyak bukti yang menunjukkan keberpihakan AS terhadap Israel, antara lain:¹⁵ Persetujuan dan dukungan AS terhadap berdirinya Negara komonoth Yahudi Israel di Palestina pasca perjanjian Balfour 2 Februari 1917.

1. Keputusan senator dan kongres AS atas dukungan penuh berdirinya negara Israel di Palestina 11 September 1922.
2. Keputusan bersama untuk merubah Palestina menjadi negara Yahudi, dan jika mereka menolak maka harus diatasi dengan kekuatan militer pada 11 Mei 1942.
3. Surat Presiden Roosevelt mendukung eksodus dan migrasi Yahudi ke Palestina dan mendirikan negara Yahudi di Palestina pada 16 Maret 1945
4. Surat Presiden Truman kepada PM Inggris Attlee menijinkan 100 ribu Yahudi segera dikirim ke Palestina pada 31 Agustus 1945
5. AS menekan secara intensif beberapa negara untuk mendukung voting pemecahan palestina menjadi 2 wilayah, Yahudi dan bangsa Arab pada 29 November 1947
6. Presiden Truman mengumumkan pengakuan berdirinya negara Israel dan langsung membuka hubungan diplomatik resmi sepuluh menit terbentuknya negara Israel 14 Mei 1948. Pada tanggal 12 Juni 1966 AS menekan badan Keamanan PBB untuk menghentikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Palestina.
7. Pada tanggal 2 Agustus 1966 Presiden Johnson terus mendukung eksistensi Israel dan akan membantunya menjadi negara Super Power di timur Tengah
8. Pada bulan Januari 1979 presiden AS tidak akan membuka peluang pembicaraan dengan PLO
9. Pada tanggal 12 Juni 1982 Menlu AS Alexander Heed menegaskan tidak akan menekan Israel keluar dari Libanon.
10. Pada tanggal 12 November 1983 Presiden Reagan menegaskan bahwa sikap Washington tetap konsisten menjaga keamanan Israel.
11. Pada 28 Oktober 1984 Presiden Reagan menegaskan bahwa Israel adalah negara koalisi strategis dan sahabat Amerika.
12. Pada tanggal 15 Mei 1985 Menlu AS menegaskan bahwa Washington akan menghalangi usaha sebagian kalangan untuk membentuk Negara Palestina merdeka.
13. Pada tanggal 16 Februari 1988 Juru Bicara Gedung Putih menyatakan bahwa politik AS tetap pada persepsi lamanya tentang hakikat perdamaian di

¹³ Utomo dan Hery Sucipto, *Irak Pasca Invasi: AS, Minyak dan Berakhirnya Pan Arab*, (Jakarta: Global Mahardika Netama, 2003), hlm. 63

¹⁴ Suprpto, *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku*, (Jakarta: PT. Rajawali 1997), hlm.28

¹⁵ Safari, *Mengapa Mereka Membunuh Syaik Ahmad Yasin*, (Bogor: Aufa Press, 2005), hlm. 56

Timur Tengah yakni semua rakyat Palestina dan bangsa Arab dan muslim agar melepaskan tanah Palestina kepada Israel, dan kalau itu terpenuhi, maka berarti perdamaian di kawasan itu akan cepat terwujud.

14. Hingga tahun 2004, AS melakukan 79 kali veto terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan masalah-masalah sanksi terhadap Israel, mengutuk kekerasan Israel, dan resolusi yang dianggap merugikan Israel.
15. Pada bulan Juli 2006 Bush menyatakan kepada PM Inggris Tony Blair tentang sikapnya mendukung serangan Israel ke Libanon sebagai balasan atas penculikan tentara Israel.
- 16.

C. Penggunaan Hak Veto

Untuk menjaga perdamaian dunia yang lebih stabil, PBB memberikan hak veto kepada 5 negara besar meliputi Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris dan Perancis. Pemberian hak veto kepada 5 negara tersebut dengan asumsi bahwa jika negara besar memiliki fasilitas yang lebih besar dari negara 'pada umumnya', maka tidak akan terjadi kecemburuan sosial antar negara besar yang dapat sistem tata perdamaian dunia.

Namun faktanya, penggunaan hak veto seringkali disalahgunakan oleh negara anggota tetap tersebut. Problematika hak veto selalu membayangi legitimasi DK PBB. Dengan hak veto, anggota tetap setiap saat dapat mempengaruhi terjadinya perubahan substansi secara besar-besaran dari suatu resolusi. Bahkan, hak veto mampu mengancam terbitnya resolusi yang dianggap tidak menguntungkan negara maupun sekutunya. Di sisi lain, di antara anggota tetap selalu saling mengancam untuk menggunakan hak veto-nya dalam suatu forum konsultasi tertutup agar kepentingan mereka masing-masing dapat terpenuhi tanpa sama sekali mempedulikan substansi permasalahan.

D. Veto Amerika Serikat

Dalam konflik Palestina-Israel. Amerika Serikat telah menggunakan hak vetonya lebih dari anggota tetap lainnya sejak tahun 1972, khususnya terhadap resolusi yang ditujukan bagi Israel. Dalam konflik Arab-Israel, dari 175 resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Israel, 97 menentang Israel, 74 netral dan 4 mendukung Israel. Tentunya ini tidak termasuk resolusi yang diveto Amerika Serikat. Sedangkan pada pemungutan suara pada Majelis Umum, 55.642 suara menentang Israel, dan hanya 7.938 yang mendukung Israel. Khusus konflik Palestina-Israel, dari 82 veto Amerika Serikat, nyaris setengahnya berhubungan dengan dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, yaitu sebanyak 41 veto. Akibat dari pembelaan yang dilakukan Amerika Serikat itu, banyak kasus pembangkangan yang dilakukan oleh Israel terutama dalam implementasi resolusi. Di mana, Israel tidak mematuhi dengan tetap melanjutkan penyerangannya atas tanah yang diperebutkan. Dewan Keamanan PBB tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai polisi dunia sebagaimana yang tercantum dalam

Piagam PBB¹⁶. Padahal sebagai badan eksekutif, DK mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan kekerasan demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan dunia. Hal ini bisa dilihat pada pasal 39-51 Piagam PBB yang memberikan rekomendasi kepada DK melalui investigasi untuk menentukan apakah terdapat suatu keadaan yang mengancam (*threat of peace*), pelanggaran terhadap perdamaian (*breach of peace*), ataupun suatu agresi (*act of aggression*). Namun Faktanya, implementasi menjadi tidak efektif karena nuansa politis dari kepentingan negara anggota tetap (terutama Amerika Serikat) yang begitu dominan dibandingkan *common interest* bagi anggotanya. Akibatnya, penggunaan hak veto sering melenceng dari garis yang telah ditetapkan. PBB semakin tidak bernyali. Berbagai keputusan yang dihasilkan selalu memihak ke arah Amerika Serikat. Melemahnya peran dan kekuatan PBB disebabkan oleh masih dominannya Amerika Serikat dalam tubuh PBB. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pekerjanya 2/3 merupakan warga Amerika. Di samping itu, Amerika Serikat merupakan penyumbang terbesar (iuran) PBB. Sejak awal terbentuknya PBB hingga kini, Amerika Serikat merupakan donatur utama. Oleh karena itu, secara politis PBB amat sangat sulit terpisahkan dari kepentingan politik global Amerika Serikat.

E. Kedudukan Israel dan Palestina di tengah-tengah Masyarakat Internasional

Seperti yang diketahui bangsa Palestina maupun Israel, telah mendapat pengakuan dari PBB. Bahkan setelah menjadi Negara, Israel telah diterima menjadi anggota PBB, sejak bulan Mei 1949, akan tetapi hal itu tidak menjadi jaminan bagi Israel, maupun Palestina untuk mendapat pengakuan dari anggota PBB.

Hal ini karena, berdasarkan prinsip yang ditetapkan sejak awal berdirinya PBB. Seperti juga prinsip yang ditetapkan dalam liga bangsa-bangsa, bahwa keanggotaan suatu Negara terhadap PBB, tidak memerlukan keterlihatan pengakuan Negara-negara anggota lainnya. Selain itu anggota PBB tidak menimbulkan akibat apapun terhadap status suatu negara¹⁷. Dengan demikian maka merupakan suatu hal yang wajar, apabila keberadaan Palestina dan Israel sebagai Negara, mendapat sambutan yang berbeda-beda dari masyarakat internasional. Ada yang mengakui kedua Negara tersebut ada yang menolak salah satu menerima yang lain. Sedangkan bentuk pemberian pengakuannya pun cukup beragam ada yang memberikan pengakuan secara tegas (*expressed recognition*), ada yang melakukannya dengan diam-diam (*implied recognition*), bahkan ada pula yang memberikan pengakuan bersyarat.

F. Dampak Kebijakan PBB bagi Palestina

Keberadaan Palestina dalam masyarakat Internasional, dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu kedudukannya sebagai bangsa dan kedudukannya

¹⁶ Ibid., hlm.548

¹⁷ Henry Cattan, *Palestine and International Law*. Edisi I. Longman, London, 1976. H.16

sebagai Negara. Dalam kedudukannya sebagai bangsa, Palestina sudah tidak ada masalah, karena sejak sebelum timbulnya konflik dengan Israel, Palestina sudah diakui sebagai bangsa, yang menempati wilayah Palestina dan pengakuan tersebut disahkan oleh PBB bahkan diperkuat oleh PBB, serta dianggap sebagai embrio sebuah Negara. Hal ini terbukti dengan diikutkannya Palestina dalam sidang-sidang PBB sebagai peninjau. Akan tetapi menyangkut keberadaannya sebagai Negara, Palestina menemui kendala, yaitu tidak sepenuhnya unsur-unsur Negara yang dimiliki Palestina. Memang Palestina sudah memiliki penduduk yang tetap di wilayah tertentu, pemerintah maupun kemampuan untuk berhubungan dengan Negara lain, akan tetapi ke empat unsur tersebut tidak dapat terintegrasi dengan sempurna. Meski keempat unsur tersebut tidak sempurna, tidak terlalu dipersoalkan oleh masyarakat internasional, karena tidak membahayakan perdamaian internasional. Selain itu di sadari hukum internasional senantiasa berkembang, sehingga tidak harus selalu berpegang pada teori yang sudah ada, Mengenai pengakuan Palestina sebagai Negara, terdapat empat sikap yang berbeda yaitu:

1. Secara tegas menolak: penolakan ini dilakukan oleh 3 negara, Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Masing-masing memiliki alasan yang berbeda. Amerika menolak memberikan pengakuan dengan alasan proklamasi pembentukan Negara Palestina tidak sah, dikarenakan sidang Nasional Palestina ke-19 sebagai pembentuk Negara palestina tersebut dianggap sebagai tindakan sepihak. Pihak Israel menolak dengan alasan tidak bersedia menyinggalkan jalur Gaza, Tepi Barat, serta Jerusslaem, yang tidak termasuk dalam ketentuan resolusi PBB No 181, yang digunakan oleh Palestina sebagai acuan. Adapun Iran menolak, bukan karena tidak menyetujui berdirinya Negara Palestina akan tetapi ia tidak menyetujui resolusi mengenai pembagian wilayah dengan Isarel dijadikan acuan Iran semata mata menginginkan Israel meninggalkan Palestina secara total.
2. Negara yang mengakui dan mendukung terdiri dari Negara-negara sosialis, Timur Tengah, serta Negara lain yang semula simpati dengan Palestina, seperti Indonesia
3. Negara-negara blok barat, menyambut baik atas penerimaan Palestina terhadap resolusi tersebut, akan tetapi menolak mengakui Negara Palestina, karena dianggap tidak memenuhi unsur hukum internasional sebagai Negara
4. Menerima putusan sidang Palestina tetapi menunda memberikan pengakuan terhadap Negara Palestina. Negara yang bersikap seperti ini adalah Jepang, Yunani dan Jerman Timur¹⁸

Kesepakatan Oslo I dan II secara umum memiliki arti yang penting bagi berdirinya Negara Palestina. Karena hasil dari kedua kesepakatan tersebut memberikan hak-hak otonom terhadap wilayah-wilayah

di Palestina serta penarikan pasukan Israel yang khususnya berda di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Dengan demikian, masyarakat Palestina terbebas dari segala intimidasi yang dilakukan pasukan Isarel agar mereka keluar dari wilayah-wilayah yang telah mereka tinggali. Selain itu dengan ditandatangani kedua kesepakatan tersebut berhak menyatakan kemerdekaan Palestina di wilayah-wilayah yang telah disepakati dalam kesepakatan tersebut yaitu Tepi barat dan Jalur Gaza.

G. Dampak Kebijakan PBB bagi Israel

Dampak Kebijakan PBB bagi Israel tidak lepas dari kepentingan Amerika Serikat yang terus memberikan dukungan kepada Israel. Amerika Serikat sebagai Negara yang memiliki peranan dominan dalam tubuh PBB bahkan memiliki hak veto yang lebih banyak pro terhadap Israel. Disini erat kaitannya antara PBB dan Amerika Serikat sebagai Negara Adikuasa yang berperan penting bagi PBB. Adapun berbagai kebijakan Politik Luar Negeri AS yang mendukung Israel sebagai berikut:

1. Tanggal 21 Februari 1983, Presiden Amerika, Ronald Reagan meminta kepada seluruh Negara-negara Arab agar menerima eksistensi Israel sesuai dengan realitas yang ada.
2. Tanggal 4 Desember 1983, Reagan menegaskan sikap negaranya yang akan terus membantu menjaga keamanan Israel dan melawan semua hal yang mengancam keamanannya.
3. Tanggal 15 Mei 1985, Menlu AS menegaskan bahwa Washington akan terus menghalangi usaha sebagian kalangan untuk membentuk Negara Palestina merdeka.
4. Tanggal 30 September 1985, Reagan menyetujui aksi militer Israel terhadap rumah kediaman ketua PLO di Tunisia sebagai bagian melindungi diri dari aksi teroris.
5. Tanggal 18 Februari 1986, AS menolak permintaan ketua PLO agar AS mengakui hak bagi rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri.
6. Tanggal 16 Februari 1988, Jubir Gedung Putih menyatakan bahwa politik Amerika tetap pada persepsi lamanya tentang hakikat perdamaian di Timur Tengah yaitu semua rakyat Palestina dan bangsa Arab dan muslim agar melepaskan tanah Palestina kepada Israel, kalau itu terpenuhi, maka berarti perdamaian di kawasan itu akan cepat terwujud.
7. Tanggal 1 Maret 1988, salah satu organisasi Amerika di bawah PBB meminta agar menghapus keanggotaan PLO dan kantornya di PBB. Mereka juga menuntut agar menyeret seluruh anggota PLO ke pengadilan internasional.
8. Tanggal 10 Maret 1988, Pemerintah Amerika secara sepihak menutup kantor perwakilan PLO di PBB yang mereka berlakukan sejak tanggal 21 Maret 1988. Keputusan itu tanpa memperhatikan semua kesepakatan internasional.

¹⁸ Kedutaan Besar Palestina, *Masalah Palestina Dan Konflik Arab-Israel*, hal. 20

9. Tanggal 17 Mei 1988, Reagan dan Menlu AS George Solutes menegaskan bahwa solusi terakhir dari konflik di Palestina terletak pada keseriusan bangsa Arab untuk melepaskan tanah Palestina untuk bangsa Yahudi.
10. Tanggal 27 Juli 1988, Kongres Amerika menyetujui keputusan pemerintah untuk memindahkan kedutaan Besar AS dari Kota Tel-Aviv ke Al-Quds (Yerusalem).
11. Tanggal 15 November 1988, Departemen Luar Negeri Amerika mengumumkan bahwa Amerika tidak setuju dengan usulan pembentukan Negara Palestina Merdeka, karena hal itu berarti mengakui kepastian masa depan wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Padahal kedua wilayah itu masih ada dalam persengketaan antara Israel dan Palestina yang baru bisa diselesaikan dalam meja perundingan.
12. Tanggal 25 November 1988, Amerika melarang pemimpin PLO yang mereka akui sebagai Presiden Palestina untuk masuk ke Amerika guna memberikan sambutan dalam sidang umum DK PBB. Tanggal 30 November 1988, mayoritas anggota DK PBB dengan suara voting 151 suara mengakui resolusi tentang pengakuan hak bagi Pemimpin PLO Yaser Arafat untuk berpartisipasi dalam pertemuan anggota DK PBB. Tetapi Amerika dan Israel menolak resolusi itu dengan alasan karena Yaser Arafat tidak mendapatkan visa dari pihak keimigrasian Amerika

AS telah mem-veto banyak resolusi Dewan Keamanan PBB yang membatasi hegemoni Israel, memasok negara Yahudi tersebut dengan lebih banyak bantuan per penduduknya daripada negara manapun di dunia, mempersenjatainya dengan persenjataan yang terlarang bagi negara lain, dan kelihatannya akan tetap bias terhadap Israel. Cinta buta terhadap Israel didorong bukan berdasarkan jajak pendapat publik di AS, bukan juga berdasarkan pemahaman mendalam warga negaranya, rakyat biasa Amerika tentang Timur Tengah. Kebijakan tersebut manifestasi dari kekuasaan Komite Kemasyarakatan Israel Amerika, lebih dikenal sebagai AIPAC, atau lobi Israel. Tanpa diketahui oleh orang Arab hampir di manapun, rakyat biasa Amerika tidak tahu banyak tentang Timur Tengah, tentang Palestina, Irak atau Lebanon. Sebelum 2011/9, rakyat biasa Amerika tidak tahu banyak tentang wilayah tersebut dan masih belum cukup tahu. Orang Amerika memilih perwakilan mereka di Kongres dan Senat untuk mewakili suara mereka, dan hanya peduli dengan politik dan kebijakan dalam negeri. Dalam negara demokrasi, tidak seperti halnya kediktatoran di mana setiap orang adalah ahli politik, rakyat menyerahkan urusan politik ke tangan politisi dan meneruskan kehidupan mereka. Ketika memilih seorang presiden, ekonomi menjadi pertimbangan pertama. Dukungan Eropa tidak menjelma menjadi dukungan bagi tujuan-tujuan Arab yang benar seperti pelaksanaan Resolusi PBB 242, penarikan mundur pasukan dari daerah pendudukan, dan penghentian kekerasan terhadap Lebanon. Sebuah pendapat publik

pro-Arab di AS paling-paling hanya dapat memberikan hasil dan simpati yang sama. Sejak awal berdirinya, Negara Israel mendapatkan pengakuan de facto maupun de jure hanya dari tiga Negara saja. Di dunia ini, sedangkan sekitar empat puluh Negara menyatakan menolak untuk mengakui keberadaan Israel. Akan tetapi dalam kurun waktu yang cukup panjang sejak tahun 1948 sampai saat ini muncul perubahan yang cukup berarti bagi pengakuan terhadap Israel.

1. Kelompok Negara yang memberikan pengakuan :

Pada saat awal berdirinya Negara Israel, sebagian besar Negara-negara di dunia ini menolak kehadiran Negara Israel, termasuk Negara-negara Arab yang mempunyai kepentingan langsung dengan konflik Israel-Palestina serta memiliki keterkaitan etnis dan geografis. Alasan mereka adalah Israel, tidak berhak atas wilayah Palestina tersebut. Akan tetapi jumlah Negara yang tetap berpendirian untuk menolak mengakui Israel, saat ini mengalami perubahan sebagian dari mereka beralih mengakui keberadaan Israel, baik secara diam-diam maupun bersyarat. Sedangkan hingga saat ini yang tetap bertahan menolak keberadaan Israel, secara mutlak adalah Iran.

2. Kelompok Negara yang memberikan pengakuan :

Yang diberikan masyarakat internasional terhadap Israel juga mengalami perubahan. Jika semula hanya 3 negara maka saat ini jumlahnya berkembang. Akan tetapi bentuk serta proses pengakuannya tidak sama, tergantung pada sikap politis Negara tersebut terhadap Israel yaitu:

- a. Pengakuan secara de facto yang kemudian diikuti dengan pengakuan de jure, semula hanya dilakukan oleh Inggris, Amerika dan Rusia, tidak lama setelah Israel memproklamkan negaranya. Akan tetapi sejak perjanjian Camp David, yang dibuat antara Israel, Mesir dan Amerika Serikat, tepatnya tanggal 26 Maret 1979, Mesir dapat dimasukkan dalam kelompok Negara-negara yang mengakui Israel secara de facto bahkan de jure. Semula pengakuan tersebut dilakukan secara diam-diam yang diwujudkan dengan kunjungan pertama, presiden Mesir ke Israel, pada tahun 1978 Disusul perjanjian perdamaian Camp David yang kemudian dilanjutkan dengan saling mengirim duta besar.

Tindakan yang berani dari Mesir tersebut mendapat tentangan keras dari Negara-negara Arab terutama Palestina. Sadat sebagai enanda tangan perjanjian tersebut, oleh Muammar Qadthafi, presiden Libya, sebagai orang yang melakukan dosa yang tak terampuni, karena mengkhianati

perjuangan bangsa Arab dan Palestina.¹⁹ Sedangkan dari Majelis Umum PBB perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena dilakukan secara sepihak, diluar kerangka PBB tanpa mengikut sertakan pihak Palestina²⁰

Meskipun saat ini Mesir sudah menutup perwakilannya di Tel Aviv, karena tidak setuju atas tindakan Israel, yang terus menerus membunuh orang-orang Palestina,²¹ sikap Mesir itu merupakan cerminan dari pengakuan de jure sedangkan mengenai penarikan mundur duta besar Mesir tersebut, tidak berarti Mesir mencabut pengakuannya, karena seperti yang diketahui pengakuan terhadap suatu Negara yang sudah mencapai taraf de jure adalah bersifat mutlak, tidak bias ditarik kembali.

Sebagai akibat dari pengakuan yang diberikan oleh Negara tersebut, terjadi hubungan timbal balik, dalam berbagai bidang. Terutama dengan Amerika Serikat, keduanya menjadi patner, dala segala bidang.

b. Pengakuan de facto :

Ada beberapa Negara yang sudah sejak awal berdirinya memberikan pengakuan secara de facto kepada Israel, secara bersyarat. Seperti yang dilakukan oleh Indonesia yaitu akan mengakui Israel apabila Israel mau mematuhi resolusi kebijakan dari DK PBB.

Akan tetapi Negara yang semula memberi pengakuan bersyarat maupun yang menolak akhirnya memberikan pengakuan secara de facto terhadap keberadaan Isarel. Hanya saja pengakuan de facto tersebut dilakukan secara diam-diam. Perubahan tersebut muncul bersamaan dengan pengakuan terhadap berdirinya Negara Palestina

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Kajian historis yang dapat diambil dari konflik Palestina-Israel yang berlangsung sangat lama. Konflik tersebut membuat PBB melakukan tindakan untuk mengatasi konflik tersebut karena konflik yang terjadi antara Palestina-Israel memicu banyak perubahan dan menelan banyak korban baik di warga Palestina maupun Israel. Banyaknya korban yang berjatuh akibat perang membuat Dewan Keamanan PBB mengeluarkan berbagai kebijakan seperti dikeluarkannya resolusi-resolusi, dan dengan diadakannya perundingan-perundingan baik di

kedua belah pihak berkonflik maupun dalam forum internasional.

2. Kebijakan PBB tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam penggunaan hak istimewa tersebut seringkali dilakukan penyimpangan oleh Negara pemegang hak veto untuk kepentingan nasional maupun sekutunya karena secara yuridis hak veto tidak diatur secara jelas dalam Piagam PBB. Hegemoni Barat AS dan sekutunya selalu berada dalam barisan terdepan dalam konflik dan perdamaian. Hal ini berkaitan dengan adanya konstelasi politik dimana AS harus mempunyai tempat strategis di kawasan Timur Tengah agar memudahkan AS untuk menerapkan pengaruh barat di kawasan Timur Tengah. Hal ini juga nantinya akan merembet pada sektor ekonomi mereka di Timur Tengah hal tersebut yang membuat mengapa AS bersikeras melakukan dukungan terhadap Israel. Sedangkan untuk rakyat Palestina mereka di dukung oleh Negara-negara Arab seperti, Mesir, Iran, Arab, Saudi, dan Lebanon dukungan tersebut didasari atas sesama muslim dan sama-sama bangsa Arab meskipun sempat terjadi konflik intern didalam tubuh Bangsa Arab sendiri.
3. Dalam Konflik Palestina-Israel ini terlihat tidak adanya keseimbangan pada pihak Arab Palestina. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh PBB semacam hanya menjadi rencana belaka yang tidak disertai dengan implementasi yang semestinya. Dampaknya ialah salah satu pihak yang berkonflik merasa dirugikan disini ialah rakyat Palestina. Israel tidak hanya melancarkan agresinya dengan alasan melindungi diri akan tetapi dari tahun ke tahun pihak Israel juga melakukan pelebaran pemukiman hingga melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh PBB. Negara-negara Barat yang mendukung penuh atas berdirinya Negara Israel seakan-akan tidak dapat berbuat apa-apa saat rakyat Palestina ditindas oleh Israel hal ini berbanding terbalik dengan perlakuan AS yang langsung mengecam rakyat Palestina apabila rakyat Palestina melakukan serangan.

b. Saran

Hak istimewa yang dimiliki oleh lima Negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB seharusnya digunakan dengan tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan. Keputusan untuk menggunakan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan seharusnya memperhatikan asas-asas yang ada dalam piagam PBB atau asas hukum internasional lainnya dan mencerminkan sebuah keadilan dengan tidak memihak merugikan pihak manapun.

Mata kuliah harus di fokuskan pada Aspek historis, saya merasa bahwa selain mata kuliah Bahasa Belanda juga diperlukan mata

¹⁹ M. Riza Sihbudi. *Bara Timur Tengah* (Bandung : Mizan, 1991), hlm. 107.

²⁰ MU-PBB Menyatakan *Perjanjian Camp David Tidak Sah*?. Surabaya Post. 1 Desember 1979.

²¹ M. Riza Sihbudi, op.cit. Hal 109

kuliah Bahasa Arab, bahasa sumber (Bahasa Belanda) itu memang diperlukan untuk mengkaji sejarah nasional kita. Begitupun juga dengan Bahasa Arab kita perlu mempelajarinya khususnya untuk sejarawan muslim karena kita ketahui bahwa Islam pernah mencapai puncak kejayaan di masa lalu mengapa kita sebagai umat muslim tidak berusaha mengembalikan kejayaan tersebut dengan mempelajari ilmu-ilmu Sejarah islam dengan mempelajari bahasa sumber (Bahasa Arab).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Koran :

Surabaya Post, 1 Desember 1979.

Minggu Merdeka, 26 Agustus 1979

Kompas, 24 Oktober 1998

Sumber Buku :

Aminuddin Kasdi, 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press

Dipoyudo, Kirdi. 1992. *Timur tengah Dalam Pergolakan*. Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS.

Jones, Howard. 1992. *Safeguarding the Republic Essays and Dokuments in American Foreign Relations, 1890-1991*. United States: Library of Congress Cataloging-in Publication Data.

Morgenthau, Hans J. 2010. *Politik Antarbangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Utomo dan Hery Sucipto. 2003. *Irak Pasca Invasi: AS, Minyak dan Berakhirnya Pan Arab*, Jakarta: Global Mahardika Netama.

Suprpto. 1997. *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku*, Jakarta: PT. Rajawali.

Safari. 2005. *Mengapa Mereka Membunuh Syaik Ahmad Yasin*, Bogor: Afa Press.

Cattan, Henry. 1976. *Palestine and International Law*. Edisi I. Longman, London.

Jurnal :

Aminuddin Kasdi. "Jewish Agency Versus Bangsa Arab", Nganjuk. April 1972

Aminuddin Kasdi, "Bangsa Arab Palestina & Masa Depan", Surabaya, Mei 1986

Internet :

Harun Yahya, "Zionisme: Sebuah Nasionalisme Sekuler yang Mengkhianati Yudaisme". Diambil dari <http://www.tragedipalestina.com>, diakses tanggal 3 Maret 2016

Mohammad Shoelhi, "Babak Baru Perundingan Timur Tengah", dalam <http://kompas.com>, diakses tanggal 1 Maret 2016.

